

**KOALISI PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN GUBERNUR PROVINSI
LAMPUNG TAHUN 2024**

**(Studi pada Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Kebangkitan
Bangsa)**

(Skripsi)

Oleh

**DAVID SETIAWAN
NPM 2116021038**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**KOALISI PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN GUBERNUR PROVINSI
LAMPUNG TAHUN 2024
(Studi pada Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Kebangkitan
Bangsa)**

Oleh

DAVID SETIAWAN

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

KOALISI PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

**(Studi pada Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Kebangkitan
Bangsa)**

Oleh

DAVID SETIAWAN

Penelitian ini mengkaji koalisi Partai Gerindra dan PKB dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Lampung 2024, fokus pada ketidakselarasan pola koalisi antara tingkat nasional dan daerah, dengan tujuan mengetahui aktor penggagas koalisi, menganalisis penyebab terjadinya ketidakselarasan pola koalisi antara tingkat nasional dan daerah, dan mengkaji faktor-faktor motivasi pembentukan koalisi antara Partai Gerindra dan PKB dalam pemilihan gubernur Lampung tahun 2024. Metode penelitian kualitatif deskriptif digunakan melalui wawancara dengan elit partai, akademisi, dan pemantau pemilu, serta analisis dokumen artikel berita online. Teori motivasi kebijakan Anthony Downs dan teori kekuasaan Kartz & Mair menjadi kerangka analisis untuk mengidentifikasi faktor pembentukan koalisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koalisi Gerindra-PKB di Lampung dipicu oleh motivasi kekuasaan, meskipun kedua partai berseberangan di tingkat nasional. Aktor kunci penggagas koalisi melibatkan elit nasional Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar serta inisiatif lokal Rahmat Mirzani Djausal (Gerindra) yang melakukan lobi intensif kepada PKB. Koalisi ini bersifat pragmatis-transaksional, mengutamakan elektabilitas calon, penggabungan basis massa, serta kombinasi identitas Lampung-Jawa. Meski mengusung program kerakyatan seperti infrastruktur dan makanan bergizi gratis, implementasinya dinilai minim solusi konkret dan lebih bersifat seremonial. Ketidakselarasan koalisi nasional-daerah mencerminkan fleksibilitas politik lokal dalam merespons dinamika elektoral, di mana pragmatisme kekuasaan mengalahkan koherensi ideologi-kebijakan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi koalisi berbasis kebijakan dan peningkatan literasi politik masyarakat untuk mendorong akuntabilitas partai. Temuan ini memperkaya kajian politik elektoral dengan menegaskan kompleksitas hubungan nasional-daerah dalam strategi koalisi di Indonesia.

Kata Kunci: Koalisi, Partai Politik, Motivasi, Kekuasaan.

ABSTRACT

POLITICAL PARTY COALITION IN THE 2024 LAMPUNG PROVINCIAL GOVERNOR ELECTION

(A Study of Gerakan Indonesia Raya Party and Kebangkitan Bangsa Party)

By

DAVID SETIAWAN

This research examines the coalition between the Gerindra Party and the PKB in the 2024 Lampung Gubernatorial Election, focusing on the misalignment of coalition patterns between national and regional levels. The research aims to identify the key actors initiating the coalition, analyze the causes of this misalignment, and investigate the motivational factors behind the Gerindra-PKB coalition formation. A descriptive qualitative method was employed, utilizing interviews with party elites, academics, election observers, and analysis of online news articles. Anthony Downs' policy motivation theory and Katz & Mair's power theory served as analytical frameworks to identify coalition-building factors. Findings reveal that the Gerindra-PKB coalition in Lampung was driven by power motivations, despite their opposing stances at the national level. Key initiators included national elites Prabowo Subianto and Muhaimin Iskandar, alongside local actor Rahmat Mirzani Djausal (Gerindra), who conducted intensive lobbying with PKB. The coalition adopted a pragmatic-transactional approach, prioritizing candidate electability, merging voter bases, and combining Lampung-Javanese identity appeals. Though promoting populist programs such as infrastructure development and free nutritious meals, implementation lacked concrete solutions and leaned toward ceremonial symbolism. The national-regional coalition misalignment reflects local political flexibility in responding to electoral dynamics, where power pragmatism supersedes ideological-policy coherence. The study recommends strengthening policy-based coalition regulations and enhancing public political literacy to foster party accountability. These findings enrich electoral politics studies by highlighting the complexity of national-regional relationships in coalition strategies within Indonesia.

Keywords: Coalition, Political Parties, Motivation, Power.

Judul Skripsi

**: KOALISI PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN
GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024
(STUDI PADA PARTAI GERAKAN INDONESIA
RAYA DAN PARTAI KEBANGKITAN BANGSA)**

Nama Mahasiswa

: DAVID SETIAWAN

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2116021038

Program Studi

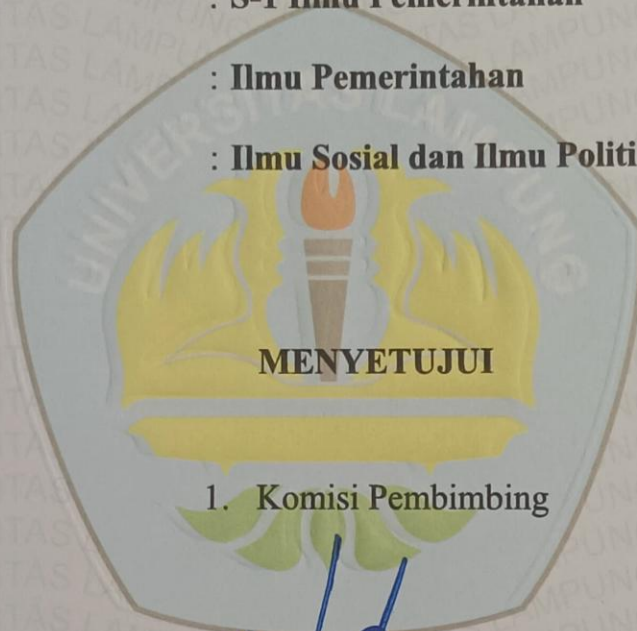
: S-1 Ilmu Pemerintahan

Jurusan

: Ilmu Pemerintahan

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



1. Komisi Pembimbing

Budi Harjo, S.Sos., M.IP
NIP. 196801121998021001

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

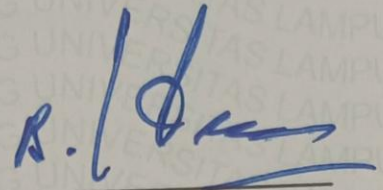
Dr. Tabah Maryanah, S.I.P., M.Si.
NIP. 197106042003122001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

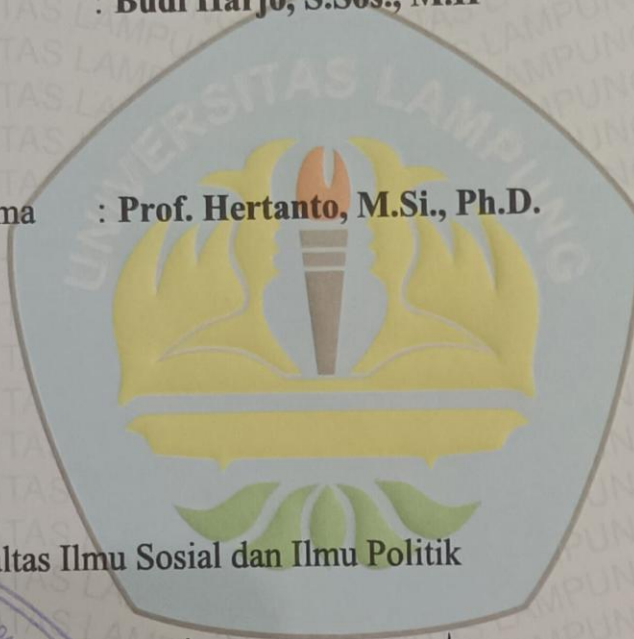
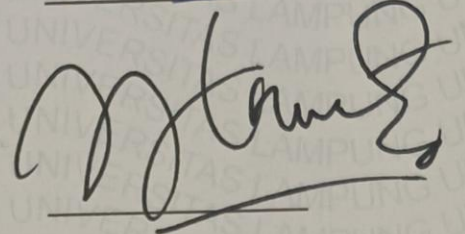
Ketua

: Budi Harjo, S.Sos., M.IP



Penguji Utama

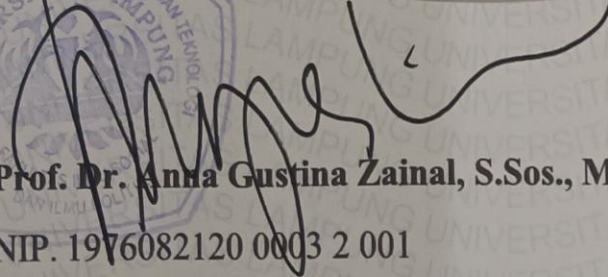
: Prof. Hertanto, M.Si., Ph.D.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.

NIP. 1976082120 0003 2 001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 20 Juni 2025

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 5 Juni 2025
Yang Membuat Pernyataan



DAVID SETIAWAN
NPM 2116021038

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama David Setiawan, dilahirkan di Lampung Tengah pada tanggal 14 Desember 2002. Peneliti merupakan putra keempat dari empat bersaudara dari Ibu Rosminah dan Bapak Hasbunalloh. Jenjang pendidikan penulis dimulai dari Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SDN 5 Bandar Jaya Barat tahun 2015, Sekolah Menengah Pertama (SMP) diselesaikan di SMPN 4 Terbanggi Besar pada tahun 2018, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) diselesaikan di SMAN 1 Terbanggi Besar pada tahun 2021. Kemudian pada tahun 2021 Penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Universitas Lampung.

Pada saat melaksanakan Studi S-1 Ilmu Pemerintahan, penulis terlibat dalam beberapa kegiatan sosial. Penulis bergabung dengan Lembaga Dakwah Fakultas (LDF) menjadi staff di Forum Studi Pengembangan Islam (FSPI) FISIP Unila dan Penulis juga bergabung dengan Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dengan menjadi staff di Bina Rohani Islam Mahasiswa (Birohmah) Unila. Demikian aktivitas yang Penulis lakukan pada saat melaksanakan studi perkuliahan.

MOTTO

"Sungguh, laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar."

(QS. Al-Ahzab 33: Ayat 35)

PERSEMBAHAN



Alhamdulillahirabbil'alamiin segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah meridhai segala ikhlar hamba-Mu, sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan

Shalawat teriring salam, selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW,
yang selalu dinantikan syafa'atnya di Yaumul Akhir

dan

Ku persembahkan tulisan sederhana ini teruntuk ...

Mamah dan Papah tercinta

Yang tak henti ber-Ikhtiar dan ber-Doa demi keberlangsungan Anakmu menjalani hidup, beribu terimakasih tak dapat membalas semua jasmu demi membesarkan Anakmu ini menjadi insan yang berguna.

Terimakasih untuk semua yang mendo'akan dan mendukung selesainya skripsi ini, semoga segala kebaikan mendapat balasan dari Allah SWT.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Bismillaahirrohmaanirrohim.

Syukur Peneliti haturkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan nikmat, anugerah serta hidayahnya yang sangat luar biasa sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Koalisi Partai Politik Pada Pemilihan Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2024 (Studi Pada Partai Gerindra dan PKB)”**. Tak lupa Shalawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik dan pemimpin bagi kaumnya.

Skripsi ini merupakan sebuah karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Dalam penyusunan skripsi ini peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan karena adanya keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang peneliti miliki. Tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini mustahil terwujud dengan baik.

Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi Peneliti melalui sanwacana ini mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang berkenan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, diantaranya:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;

3. Bapak Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik;
4. Bapak Dr. Arif Sugiono, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum;
5. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
6. Ibu Dr. Tabah Maryanah selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
7. Bapak Budi Harjo, S.Sos., M.IP selaku Dosen Pembimbing Utama dalam proses penyusunan skripsi. Terima kasih atas segala saran dan kritik. semoga Allah SWT selalu memberikan nikmat dan keselamatan dunia akhirat untuk Bapak dan beserta keluarga.
8. Bapak Prof. Dr. Hertanto, M.Si selaku Dosen Penguji. Terima kasih atas kritik dan saran yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT selalu memberikan nikmat dan keselamatan dunia akhirat untuk Bapak dan beserta keluarga.
9. Alm. Bapak Denden Kurnia Drajat, M.Si. selaku Pembimbing Akademik (PA). Abah, hatur nuhun atas ilmu yang diberikan sehingga potensi dan logika yang dimiliki oleh Penulis bisa berjalan dengan baik, Al Fatimah untuk Abah.
10. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung meski tak dapat disebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat Peneliti kepada bapak dan ibu semua. Peneliti sangat bersyukur dapat diajarkan oleh bapak dan ibu dosen semua. Terima kasih telah memberikan ilmu yang bermanfaat dalam hidup Peneliti.
11. Kedua Orangtua tercinta, Mamah Rosminah dan Papah Hasbunalloh. Terimakasih untuk segala doa yang telah dicurahkan untukku, baik dalam proses penelitian maupun yang lainnya, serta untuk kerja kerasnya untuk menjadikan peneliti insan yang berpendidikan tinggi dan bermanfaat bagi orang lain. Ucapan terimakasih tidak mampu membalas semua tetesan keringat dan doa yang tak terhenti terpanjat untuk membesarkan putramu menjadi seseorang yang berguna sesuai harapan Mamah dan Papah. Bersimpuh maaf atas kesalahan yang pernah terwujud dan maaf untuk air mata yang pernah keluar atas tindakanku. Berjuta terimakasih tidak akan terbalas untuk semua jasa Mamah dan Papah, serta ilmu yang ku dapat dari pendidikan bisa bermanfaat bagi orang lain dan dapat menjadi amal jariyah bagi Papah dan Mamah. Semoga Allah SWT selalu memberikan nikmat dan keselamatan dunia dan akhirat untuk Mamah dan Papah, semoga keberhasilan dan ketaatan dalam hidup senantiasa Allah SWT berikan

dalam hidupku agar diriku dapat terus menciptakan senyum bahagia di wajah Mama dan Papah tercinta.

12. Untuk teman-teman yang ada di Grup Pecinta Sholawat., Terima kasih telah menemani dan kebersamai dalam segala hal dari awal hingga akhir. Terima kasih atas segala tawa dan canda yang telah diberikan. Maaf atas segala hal yang menyakiti teman-teman. Semoga teman-teman selalu diberikan nikmat dan keselamatan dunia akhirat.

Terima kasih sekali lagi penulis ucapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak saya sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat dalam sanwacana ini. Penulis berharap semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian. Akhir kata semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi keberlangsungan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian khususnya di bidang politik dan pemerintahan kepada masyarakat di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 8 Juni 2025

Peneliti

DAVID SETIAWAN

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR SINGKATAN	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
II.TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Tinjauan Tentang Partai Politik	7
2.1.1 Pengertian Partai Politik	7
2.1.2 Fungsi Partai Politik	8
2.1.3 Sistem Kepartaian	10
2.2 Tinjauan Tentang Koalisi Partai Politik.....	11
2.2.1 Bentuk-bentuk Koalisi Partai Politik	11
2.2.2 Motivasi Koalisi Partai Politik.....	12
2.3 Tinjauan Tentang Pemilihan Gubernur.....	14
2.3.1 Pengertian Pemilihan Gubernur.....	14
2.3.2 Sistem Pemilihan Umum Indonesia	15
2.3.3 Pengertian Koalisi Partai Politik.....	16
2.4 Kerangka Pikir.....	18
III. METODE PENELITIAN	20
3.1 Tipe Penelitian.....	20

3.2 Fokus Penelitian.....	25
3.3 Lokasi Penelitian.....	29
3.4 Penentuan Informan.....	29
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	32
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.7 Teknik Pengolahan Data.....	34
3.8 Teknik Analisis Data.....	34
3.9 Teknik Validasi/Keabsahan Data.....	35
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	37
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	37
4.1.1 Sejarah Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Lampung.....	37
4.1.2 Objek Penelitian Partai Gerindra dan PKB	39
4.1.3 Ketidakselarasan Pola Koalisi di Tingkat Pilpres dan Pilgub (Lampung).....	42
4.2 Aktor Penggagas Koalisi Partai Gerindra dan PKB dalam Pilgub Lampung.....	51
4.2.1 Elite Nasional Sebagai Inisiator	52
4.2.2 Dinamika Negosiasi Elite Daerah.....	53
4.2.3 Peran Figur Kandidat dalam Inisiasi Koalisi	54
4.3. Faktor-Faktor Motivasi Terbentuknya Koalisi Partai Gerindra dan PKB di Lampung.....	57
4.3.1 Motivasi Kebijakan Dalam Pembentukan Koalisi Partai Gerindra dan PKB Pada Pilgub Lampung 2024.....	58
4.3.2 Motivasi Kekuasaan Dalam Pembentukan Koalisi Partai Gerindra dan PKB Pada Pilgub Lampung 2024.....	83
V. SIMPULAN DAN SARAN.....	106
5.1 Simpulan.....	106
5.2 Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA.....	109

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Motivasi Kebijakan	27
2. Motivasi Kekuasaan	27
3. Informan Penelitian	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir	21

DAFTAR SINGKATAN

AD/ART	: Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
AMIN	: Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar
DPD	: Dewan Pimpinan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPW	: Dewan Pimpinan Wilayah
FGD	: <i>Forum Group Discussion</i>
Gerindra	: Gerakan Indonesia Raya
Golkar	: Golongan Karya
Hanura	: Hati Nurani Rakyat
KIM	: Koalisi Indonesia Maju
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
MK	: Mahkamah Konstitusi
NasDem	: Nasional Demokrat
Netfid	: Network for Indonesian Democratic Society
NU	: Nahdlatul Ulama
PAC	: Pengurus Anak Cabang
PAN	: Partai Amanat Nasional
Paslon	: Pasangan Calon
PBB	: Partai Bulan Bintang
PBR	: Partai Bintang Reformasi
PDIP	: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
PDS	: Partai Damai Sejahtera

Pemilu	: Pemilihan umum
Pilgub	: Pemilihan gubernur
Pilkada	: Pemilihan kepala daerah
Pilpres	: Pemilihan Presiden
PKB	: Partai Kebangkitan Bangsa
PKPB	: Partai Karya Peduli Bangsa
PKPI	: Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
PKS	: Partai Keadilan Sejahtera
PPP	: Partai Persatuan Pembangunan
PSI	: Partai Solidaritas Indonesia
RMD	: Rahmat Mirzani Djausal
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
TPS	: Tempat Pemungutan Suara

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 menjadi momentum penting dalam perjalanan demokrasi di tingkat lokal, khususnya Provinsi Lampung. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan pilkada di Indonesia, sistem pilkada di Indonesia memberikan peluang bagi calon untuk diusung oleh partai politik (parpol) dan gabungan parpol. Parpol berperan sebagai mesin politik yang memiliki kemampuan paling efektif dan terstruktur dalam memobilisasi massa (Djuyandi dalam Putri, 2019). Dalam konteks ini, parpol sering melakukan koalisi untuk meningkatkan peluang kemenangan dalam pemilihan umum (pemilu). Dalam tingkat pilkada, pola koalisi yang terbentuk di tingkat pilkada seringkali tidak sejalan dengan koalisi di tingkat pemilihan presiden (pilpres) (Aditama, 2015). Di tingkat pilpres terdapat tiga koalisi parpol yaitu:

1. Koalisi Perubahan dengan anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasional Demokrat (NasDem), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
2. Koalisi Indonesia Maju (KIM) dengan anggota Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat.
3. Koalisi PDIP dengan anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Sedangkan di tingkat pilkada khususnya pada pemilihan gubernur (pilgub) Lampung terdapat dua koalisi yaitu: Koalisi Rakyat yang diprakarsai oleh PDIP dan KIM Plus dengan anggota partai Gerindra, PKB, NasDem, PKS, Golkar, Buruh, PAN, Demokrat, dan PSI.

Konsep KIM Plus dalam koalisi ini merujuk pada penggabungan partai-partai yang sebelumnya berseberangan di pilpres 2024, seperti pendukung paslon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Di Lampung, tiga partai utama pendukung AMIN termasuk PKB ternyata dengan mudah berkoalisi dengan Partai Gerindra, yang secara nasional berada di kubu berlawanan.

Pada pilgub Lampung tahun 2024, terdapat dua pasangan calon (paslon): Paslon nomor urut satu, Arinal Djunaidi dan Sutono, serta paslon nomor urut dua, Rahmat Mirzani Djausal dan Jihan Nurlela (KPU Provinsi Lampung, 2024). Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada motivasi parpol dalam berkoalisi, dengan menjadikan Partai Gerindra dan PKB sebagai objek penelitian. Pemilihan ini didasarkan pada kolaborasi antara Gerindra dan PKB yang menarik perhatian karena secara kekuatan partai, partai Gerindra merupakan partai pemenang pemilu legislatif (pileg) dengan jumlah total suara 865.320 suara dan PKB yang berada di urutan keempat dengan total suara 532.522 suara (KPU Provinsi Lampung). Selain kekuatan partai, calon dari masing-masing kedua partai juga merupakan calon yang memiliki tingkat elektabilitas tinggi, Rahmat Mirzani Djausal yang merupakan mantan anggota DPRD Lampung pada periode 2019-2024 dan juga anggota DPRD terpilih pada periode 2024-2029 meskipun telah mengundurkan diri untuk maju pada pilgub 2024, lalu Jihan Nurlela yang merupakan anggota DPD pada periode 2019-2024 dan juga anggota DPD terpilih pada periode 2024-2029 meskipun Jihan juga telah mengundurkan diri untuk maju pada pilgub 2024. Selain kekuatan partai politik dan kekuatan personal dari masing-masing calon, pemilihan ini juga didasari terbentuknya koalisi yang terjadi di tengah ketegangan nasional, di mana Gerindra dan PKB tidak berada dalam koalisi yang sama di tingkat pilpres. Fenomena ini memunculkan pertanyaan tentang “Ketidakselarasan koalisi antara tingkat pilpres dan pilgub”. Di tingkat pilpres, Gerindra pendukung Prabowo dan PKB pendukung AMIN bersaing secara sengit, tetapi di Lampung pada pilgub, keduanya justru bersatu mengusung paslon bersama. Hal ini menimbulkan spekulasi tentang

kepentingan pragmatis di balik koalisi "tak lazim" tersebut, seperti pertukaran kekuatan elektoral atau negosiasi jabatan. Dinamika ini memicu ketertarikan para peneliti politik untuk mengungkap “Aktor penggagas koalisi Gerindra-PKB di Lampung”. Apakah inisiatif datang dari elit partai daerah yang mengutamakan kepentingan lokal, atau ada "restu terselubung" dari pusat meski secara formal berseberangan? Perilaku parpol di Lampung dalam berkoalisi ini menunjukkan ideologi partai tidak menjadi dasar dalam menentukan koalisi pada pilkada. Parpol cenderung bersikap *promiscuous* atau serba boleh, sehingga perilakunya lebih mencerminkan asas pragmatisme transaksional (Hertanto dan Sulaiman, 2013). Transaksional menekankan bagaimana aktor mencoba mengambil kesempatan di mana ada peluang yang dapat dimanfaatkan (Sulaiman dkk., 2014). Pendekatan pragmatis ini, dapat dilihat dari cara parpol menentukan koalisi yang masih bersifat variatif dan yang menjadi pertimbangan adalah kepentingan politik, bukan kesamaan ideologi dan visi partai (Hertanto, 2014). Pertanyaan ini menggarisbawahi kompleksitas politik Indonesia, di mana koalisi bisa bersifat cair dan kontradiktif, tergantung pada konteks kepentingan elektoral yang dihadapi. Hal ini mengindikasikan adanya motivasi dan kepentingan lokal yang lebih dominan dalam pembentukan koalisi di tingkat daerah (Aditama, 2015), sehingga peneliti juga akan membahas apa faktor-faktor motivasi Gerindra dan PKB berkoalisi. Dalam proses praktik demokrasi tersebut sering kali diwarnai oleh aspek kepentingan antara pusat dan daerah, bahkan antara kepentingan nasional dan internasional (Susilawan dkk., 2015).

Sebagai bahan referensi dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai bahan kutipan. Penelitian terdahulu menunjukkan beragam perspektif dalam mengkaji koalisi parpol. Holilah dan Khaq (2024) dengan judul “Implikasi Koalisi Partai Pada Proses Pembentukan Kebijakan di Daerah. JPW (Jurnal Politik Walisongo), 6(1), 28-47”. Menganalisis koalisi partai secara komprehensif mencakup tiga arena elektoral, legislatif, dan pemerintahan dengan menggunakan teori Arend Lijphart dan William Dunn. Sementara itu, Yaqin dan Wardani (2021) dengan judul “Motivasi

pembentukan koalisi mayoritas pengusung pasangan calon Machfud Arifin dan Mujiaman dalam Pilkada Kota Surabaya tahun 2020. Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, 7(2), 52-75". Mengkaji pembentukan koalisi mayoritas dalam Pilkada Surabaya 2020 dengan memadukan teori motivasional Geoffrey Pridham dan pilihan rasional untuk memahami kepentingan aktor politik.

Ekowati (2019) dengan judul "Pragmatisme politik: Antara koalisi, pencalonan, dan calon tunggal dalam pilkada. *Transformative*, 5(1), 16-37". Memberikan perspektif berbeda dengan menggunakan pendekatan pragmatisme untuk menganalisis fenomena calon tunggal sebagai dampak dari dinamika koalisi. Putri (2019) dengan judul "Analisis motif koalisi partai politik dalam menghadapi pemilihan gubernur Lampung tahun 2018 studi pada partai NasDem, PKS dan Hanura. Skripsi. Universitas Lampung". Meneliti motif koalisi partai politik dalam Pilgub Lampung 2018 menggunakan teori Wolfgang Muller, Kaare Strom, dan Abraham De Swaan tentang koalisi ideologis, serta konsep koalisi pragmatis dari Kartz dan Mair. Sujatmiko (2016) dengan " Judul Kartelisasi partai politik pada pemilihan kepala daerah Kota Bandar Lampung tahun 2015. Skripsi. Universitas Lampung". Mengkaji kartelisasi partai politik dalam Pilkada Bandar Lampung 2015 dengan *rational choice theory* dan pendekatan *collective-action*.

Berdasarkan penelitian terdahulu, penelitian ini memiliki kebaruan dalam penggunaan teori motivasi kebijakan yang berfokus pada *vote-seeking behavior* sebagaimana dijelaskan Anthony Downs (1957), dikombinasikan dengan konsep koalisi kekuasaan dari Kartz dan Mair. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini akan menganalisis faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pemilihan mitra koalisi, dengan hasil akhir berupa identifikasi apakah koalisi yang terbentuk bersifat kebijakan atau kekuasaan. Meskipun sama-sama mengkaji koalisi partai politik, metodologi dan kerangka teoritis yang digunakan memberikan sudut pandang baru dalam memahami dinamika koalisi partai politik di tingkat daerah.

Berdasarkan uraian di atas mengenai fenomena-fenomena menjelang pilgub Lampung 2024, maka peneliti dalam penelitian ini mengangkat judul “Koalisi Partai Politik Pada Pemilihan Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2024 (Studi Pada Partai Gerindra dan PKB)”. Penelitian ini berkaitan dengan dua mata kuliah yaitu Partai Politik dan Pemilihan Umum.

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis aktor politik yang berperan sebagai penggagas atau inisiator dalam pembentukan koalisi antara Partai Gerindra dan PKB di tingkat daerah Lampung.
2. Untuk mengidentifikasi dan mengkaji faktor-faktor motivasi yang melatarbelakangi terbentuknya koalisi antara Partai Gerindra dan PKB dalam Pemilihan Gubernur Lampung 2024.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka peneliti dapat mengidentifikasi permasalahannya yaitu, adanya ketidakselarasan pola koalisi parpol antara tingkat nasional dalam pilpres dan tingkat daerah dalam pilgub Lampung 2024 yang membuat peneliti tertarik untuk mengungkapkan siapa aktor penggagas koalisi tersebut karena melalui ketidakselarasan tersebut peneliti melihat adanya indikasi motivasi dan kepentingan berbeda dalam berkoalisi di tingkat daerah dengan hasil akhir berupa identifikasi apakah koalisi yang terbentuk bersifat motivasi kebijakan atau kekuasaan, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah: “Bagaimana proses pembentukan koalisi Partai Gerindra dan PKB dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2024?”

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu politik khususnya dalam kajian koalisi partai politik dan dinamika politik lokal.
 - b. Memperkaya literatur akademik mengenai pola-pola koalisi partai politik di tingkat daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan koalisi tersebut.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai dinamika pembentukan koalisi partai politik di tingkat daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
 - b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar “Sarjana Ilmu Pemerintahan di Universitas Lampung.

II. TINJAUN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Partai Politik

2.1.1 Pengertian Partai Politik

Parpol merupakan suatu organisasi yang terorganisir secara sistematis di mana para anggotanya memiliki kesamaan dalam prinsip, pandangan, dan cita-cita. Sebagaimana dijelaskan oleh Miriam Budiardjo (2015), esensi fundamental dari partai politik terletak pada upaya memperoleh kekuasaan politik dan menduduki jabatan strategis dalam pemerintahan melalui metode yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Pencapaian posisi otoritas ini bertujuan untuk mengimplementasikan agenda kebijakan yang telah dirumuskan, sekaligus menempatkan partai politik sebagai sarana bagi kelompok masyarakat yang sepaham untuk bersinergi dalam upaya meraih kekuasaan sekaligus membentuk arah kebijakan negara. (Labolo dan Ilham dalam Putri, 2019).

Keberadaan parpol bermula dari prinsip bahwa pembentukan sebuah wadah organisasi akan memudahkan penyatuan orang-orang yang memiliki visi dan pemikiran sejalan, hal ini memungkinkan mereka untuk menggabungkan pemikiran yang serupa, dengan cara ini, Peran mereka dalam tahap perancangan hingga eksekusi keputusan strategis mengalami peningkatan yang krusial. (Budiardjo, 2015). Dalam pandangan Burke, parpol berfungsi sebagai wadah yang menyatukan individu-individu untuk bekerja bersama dalam mencapai tujuan tersebut sedangkan Ware beranggapan bahwa parpol merupakan sebuah institusi

yang berperan dalam memengaruhi negara melalui penguasaan posisi-posisi strategis dalam pemerintahan (Ware dalam Gibran, 2022). Dengan demikian, partai politik memiliki kekuatan untuk menentukan arah dan kebijakan negara melalui jabatan-jabatan yang mereka kuasai (Ridho, 2013).

Giovanni Sartori mendefinisikan “Parpol sebagai sebuah kelompok yang terlibat dalam pemilihan umum dan memiliki kemampuan untuk menempatkan calon-calon mereka pada posisi-posisi publik melalui proses tersebut” (Sartori dalam Syaputra, dkk, 2022). Dengan kata lain, parpol berfungsi sebagai entitas yang berpartisipasi dalam pemilihan untuk memperoleh jabatan-jabatan pemerintahan (Budiardjo, 2015). Secara teori, parpol memiliki peran utama dan tanggung jawab dalam merekrut elite politik, parpol menyeleksi kandidat yang dinilai selaras dengan nilai dan agenda partai untuk menduduki jabatan strategis di ranah politik. Melalui mekanisme ini, partai berfungsi sebagai instrumen kunci dalam menentukan kualitas kepemimpinan yang akan melaksanakan tugas-tugas kenegaraan. (Darmastuti, 2020).

2.1.2 Fungsi Partai Politik

Katz dan Crotty (2014), parpol memiliki empat fungsi utama, yaitu koordinasi, kompetisi dalam pemilihan umum, rekrutmen, serta representasi. Di sisi lain, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik juga menegaskan bahwa parpol berperan sebagai instrumen untuk:

- a. Sarana pendidikan politik. Partai politik berperan mendidik anggotanya dan masyarakat luas tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara.
- b. Penciptaan iklim kondusif yang mendukung persatuan dan kesatuan bangsa.

- c. Penyalur aspirasi rakyat dan pemerintah dengan menyerap, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi rakyat dalam proses perumusan kebijakan negara.
- d. Partai politik sebagai sarana partisipasi politik warga negara Indonesia
- e. Sarana rekrutmen politik, partai politik berperan dalam mempersiapkan kader-kader pemimpin bangsa melalui proses rekrutmen dan kaderisasi untuk mengisi jabatan-jabatan politik, dengan memperhatikan aspek kesetaraan dan keadilan gender.

Menurut Russel J Dalton dan Martin P. Wattenberg (Maulida, 2021) membagi fungsi partai menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut :

1. Partai di Elektorat

Dalam konteks ini, fungsi partai politik berkaitan dengan peranannya sebagai penghubung antara individu dalam sistem demokrasi. Terdapat empat peran kunci parpol yang terkait dengan pemilih, meliputi: (1) Mempermudah pemilih dalam menentukan pilihan; (2) Meningkatkan kesadaran politik masyarakat; (3) Mengembangkan simbol pengikat identitas dan kesetiaan; serta (4) Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik.

2. Partai sebagai Organisasi

Bagian ini, peran partai merujuk pada perannya dalam sebuah wadah organisasi dengan 3 fungsi yaitu: (1). Rekrutmen dan sosialisasi anggota; (2). Pengorganisasian kampanye; (3). Pengelolaan sumber daya organisasi.

3. Partai di Pemerintahan

Pada bagian ini, fungsi partai merujuk pada perannya di pemerintahan yaitu: (1). Pengelolaan pemerintahan; (2). Perumusan kebijakan; (3). Kontrol terhadap pemerintah.

2.1.3 Sistem Kepartaian

Sistem kepartaian merupakan pola interaksi dan kompetisi antar parpol dalam suatu sistem politik, menurut Maurice Duverger sistem kepartaian dapat diklasifikasikan menjadi tiga bentuk utama berdasarkan jumlah partai yang memiliki kekuatan politik yang signifikan (Duverger dalam Putri, 2019) yaitu:

1. Sistem partai tunggal. Sistem ini ditandai dengan dominasi satu parpol dalam pemerintahan. Partai tunggal memiliki kontrol penuh atas proses politik dan pemerintahan, hal tersebut sering kali ditemui dalam sistem politik yang otoriter. Dalam sistem ini, partai-partai lain mungkin ada secara formal namun tidak memiliki kekuatan politik yang berarti.
2. Sistem dwi-partai. Sistem ini ditandai dengan adanya dua parpol utama yang secara bergantian memegang kekuasaan pemerintahan. Meskipun mungkin terdapat partai-partai lain, namun pengaruh mereka relatif kecil dalam konstelasi politik. Sistem ini sering dianggap lebih stabil karena menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif dan oposisi yang jelas.
3. Sistem multipartai merupakan sebuah model politik yang dicirikan oleh adanya sejumlah partai dengan kekuatan pengaruh yang cenderung seimbang, tanpa dominasi mutlak dari satu atau dua kelompok saja. Sistem multi-partai biasanya berkembang dalam masyarakat yang majemuk, di mana berbagai kelompok sosial, agama, dan etnis memiliki representasi politik melalui partai-partai yang berbeda. Sistem ini sering mengharuskan terbentuknya koalisi antar partai untuk membentuk pemerintahan yang stabil.

Giovanni Sartori kemudian memperdalam analisis sistem kepartaian dengan mempertimbangkan tidak hanya jumlah partai, tetapi juga pola interaksi antar partai, Giovanni Sartori membagi sistem multi-partai menjadi beberapa kategori: (1). Multi-partai moderat (3-5 partai); (2). Multi-partai ekstrem (lebih dari 5 partai); (3). Sistem partai predominan

(satu partai dominan dalam sistem multi-partai) (Sartori dalam Syaputra, dkk, 2022).

2.2 Tinjauan Tentang Koalisi Partai Politik

2.2.1 Bentuk-bentuk Koalisi Partai Politik

Menurut teori aliansi parpol, tidak semua parpol layak dijadikan sekutu dalam membangun koalisi. Hanya parpol dengan kapabilitas tertentu yang mampu menciptakan kerja sama efektif guna mendukung keberlanjutan dan kemajuan sistem kepartaian. Lijphart (Putri, 2019) membagi teori koalisi ke dalam lima teori utama yaitu:

- a. *Minimal Winning Coalitions*. Koalisi dibentuk dengan mempertimbangkan kecenderungan ideologi dari kiri hingga kanan, dengan demikian, pembentukan koalisi tidak selalu memperhatikan posisi partai dalam bentuk ideologi.
- b. *Minimum Size Coalitions*. Teori ini, menyatakan bahwa partai dominan dengan perolehan suara tertinggi cenderung membangun kemitraan dengan partai kecil semata-mata demi memenuhi ambang suara mayoritas yang diperlukan.
- c. *Bargaining Proposition*. Teori ini menjelaskan bahwa koalisi dibentuk dengan komposisi parpol yang minimalis. Prinsip utamanya adalah mempermudah proses negosiasi dan tawar-menawar kebijakan akibat jumlah anggota yang terbatas.
- d. *Minimal Range Coalitions*. Landasan utama pembentukan koalisi ini adalah kesamaan ideologi antarpartai, yang dianggap memfasilitasi proses pembentukan kabinet. Namun, koalisi semacam ini jarang terwujud karena cenderung mengesampingkan perbedaan visi dan prioritas kebijakan yang dimiliki masing-masing partai.
- e. *Minimal Connected Winning Coalitions*. Teori ini sering diimplementasikan dalam praktik politik kontemporer. Landasan utamanya adalah kesamaan dalam arah kebijakan yang dimiliki partai-partai, sehingga mendorong mereka membentuk koalisi.

Parpol cenderung memilih sekutu koalisi dari kelompok yang memiliki afinitas ideologis tertinggi, yang tercermin melalui platform kebijakan yang selaras.

2.2.2 Motivasi Koalisi Partai Politik

Jumlah partai politik memengaruhi dinamika pembentukan koalisi. Setiap anggota koalisi memiliki kepentingan unik, sementara dalam sistem dua partai, aliansi semacam ini jarang terbentuk. Biasanya, koalisi dalam sistem dua partai muncul sebagai reaksi terhadap ancaman internal/eksternal atau adanya kesamaan kepentingan temporer. Alternatifnya, koalisi bisa dibentuk untuk merespons isu spesifik. Sebaliknya, dalam sistem multipartai, koalisi tidak menjadi keharusan jika satu parpol menguasai mayoritas mutlak. Meski demikian, partai dominan terkadang tetap berkoalisi guna membagi tanggung jawab pemerintahan. Koalisi dalam sistem multipartai juga bertujuan memperkuat pengaruh di parlemen dan memaksimalkan keuntungan politik. Namun, keberlangsungannya rentan karena anggota koalisi dapat menarik dukungan jika situasi dianggap merugikan kepentingan mereka.

Abraham De Swaan mengembangkan konsep teoritis tentang koalisi yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented coalition*), dengan menitikberatkan peran sentral ideologi partai sebagai faktor penentu dalam proses penyusunan aliansi politik. Dalam perspektifnya, kekuasaan pemerintahan tidak dipandang sebagai tujuan final bagi para politisi, melainkan sebagai sarana strategis untuk merealisasikan agenda ideologis dan mengimplementasikan kebijakan yang selaras dengan prinsip-prinsip partai. Pendekatan ini membuka peluang bagi parpol dengan kesamaan visi ideologis untuk membentuk koalisi, karena kedekatan nilai-nilai inti meminimalkan friksi internal dan memfasilitasi konsensus dalam pengambilan keputusan. Lebih lanjut, De Swaan berargumen bahwa kolaborasi semacam ini tidak hanya bersifat instrumental, tetapi juga mencerminkan komitmen bersama untuk

menjaga koherensi kebijakan publik. Dalam sistem multipartai, misalnya, koalisi berbasis ideologi cenderung lebih stabil karena anggota aliansi memiliki pemahaman bersama tentang prioritas nasional, sehingga mengurangi risiko disintegrasi akibat konflik kepentingan. Dengan demikian, teori ini menegaskan bahwa keberhasilan koalisi tidak hanya diukur dari kekuatan numerik di parlemen, tetapi juga dari kemampuan menjaga keselarasan antara platform ideologis dan praktik pemerintahan (Swaan dalam Putri, 2019).

Teori De Swaan bertolak belakang dengan perspektif Kartz dan Mair yang menyatakan bahwa partai-partai dominan cenderung membangun konsensus untuk melindungi kepentingan bersama, terutama dalam mempertahankan keberlangsungan sistem politik yang menguntungkan mereka. Fenomena ini dikenal sebagai *cartel party* (partai kartel). Kartelisasi merujuk pada praktik kooptasi di mana parpol secara sistematis meninggalkan platform ideologis atau agenda programatik mereka demi membentuk aliansi strategis yang bertujuan mempertahankan hegemoni kolektif. Dalam konteks ini, partai-partai kartel lebih fokus pada pembagian sumber daya negara dan akses ke institusi kekuasaan ketimbang memperjuangkan nilai-nilai ideologis yang berbeda. Misalnya, mereka mungkin sepakat mengesahkan kebijakan populis jangka pendek untuk mempertahankan elektabilitas, meski bertentangan dengan prinsip dasar partai. Konsekuensinya, batas ideologis antarpol menjadi kabur, dan kompetisi politik bergeser dari perdebatan substansial menjadi persaingan teknis administratif. Lebih lanjut, Kartz dan Mair menegaskan bahwa kartelisasi tidak hanya melemahkan representasi publik, tetapi juga menciptakan oligarki politik yang sulit ditembus oleh partai baru. Fenomena ini sering ditemukan dalam sistem demokrasi matang di mana parpol mapan membentuk *gatekeeping* melalui regulasi pemilu yang restriktif, seperti syarat ambang batas parlemen yang tinggi. Dengan demikian, teori kartel party menyoroti paradoks demokrasi modern: partai yang seharusnya menjadi

saluran aspirasi rakyat justru berubah menjadi entitas yang lebih loyal kepada sesama elit politik ketimbang konstituennya (Kartz dan Mair dalam Putri, 2019). Sementara itu Downs (1957) mengemukakan teori motivasi kebijakan, teori yang menyatakan, bahwa partai politik bertindak berdasarkan kepentingan pribadi mereka dan memilih kandidat atau partai yang mereka anggap paling mampu memenuhi kebutuhan program kebijakan dan harapan mereka.

2.3 Tinjauan Tentang Pemilihan Gubernur

2.3.1 Pengertian Pemilihan Gubernur

Miriam Budiardjo (2015) mendefinisikan pemilihan gubernur adalah bagian dari sistem demokrasi dimana rakyat berdaulat untuk memilih pemimpin tertinggi di tingkat provinsi yang akan mewakili dan memimpin mereka dalam menjalankan pemerintahan. Definisi tersebut sejalan dengan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakilnya, proses pemilihan gubernur, bupati, serta walikota beserta wakilnya merupakan bentuk perwujudan kedaulatan rakyat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pemilihan ini dilaksanakan secara langsung melalui mekanisme demokratis untuk memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan pemimpin daerah sesuai prinsip keterbukaan dan keadilan.

Suatu negara dapat dikatakan demokratis apabila memiliki proses pemilu yang diselenggarakan secara periodik dan transparan guna memastikan pergantian elit kekuasaan. Pemilu berperan sebagai instrumen utama demokrasi untuk membentuk pemerintahan yang legitimasinya bersumber dari aspirasi rakyat. Dengan demikian, otoritas politik yang terbentuk diharapkan mampu merepresentasikan keinginan kolektif masyarakat, menjamin kebijakan publik yang responsif terhadap kebutuhan warga, serta mengutamakan kesejahteraan umum sebagai tujuan akhir.

Pemilu merupakan mekanisme demokratis yang memungkinkan masyarakat memilih perwakilan mereka guna mengisi posisi strategis di lembaga eksekutif (seperti presiden, gubernur, atau wali kota) dan legislatif (seperti DPR atau DPRD). Proses ini menjadi sarana utama untuk menjamin keterwakilan aspirasi publik dalam struktur pemerintahan, sehingga dapat menjalankan kedaulatan rakyat, oleh karena itu, berbagai sistem pemilihan umum pun ada. Pemilihan umum merupakan salah satu pranata yang paling representatif dalam pelaksanaan demokrasi.

2.3.2 Sistem Pemilihan Umum Indonesia

Pemilihan umum di Indonesia menganut asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas-asas sebagaimana dimaksud, dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proposional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017).

Indonesia telah berulang kali menyelenggarakan pemilu yang disebut sebagai pesta demokrasi rakyat Indonesia, baik sewaktu orde lama, orde baru dan orde reformasi, dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilu, akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok yaitu sistem distrik (*single-member constituency*) dan sistem proporsional/ perwakilan berimbang (*multi-member constituency*) (Budiardjo, 2008). Indonesia secara konsisten telah menyelenggarakan pemilihan umum yang dianggap sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, meliputi masa Orde Lama, Orde Baru, hingga era Reformasi. Dalam teori politik, meskipun terdapat berbagai sistem pemilu, pada dasarnya sistem tersebut terbagi menjadi dua model utama, yakni sistem distrik (*single-*

member constituency) dan sistem perwakilan proporsional (*proportional representation*)

2.3.3 Pengertian Koalisi Partai Politik

Koalisi parpol merujuk pada kerja sama atau gabungan strategis antarpol yang memiliki kepentingan berbeda-beda. Kolaborasi semacam ini biasanya bersifat temporer atau berbasis tujuan pragmatis, terutama dalam sistem pemerintahan parlementer, di mana kabinet koalisi terbentuk dari aliansi beberapa partai, secara teori, keberlangsungan koalisi partai akan efektif jika dibangun atas dasar pemikiran yang realistis dan rasional dari kedua belah pihak. Teori koalisi tidak terlepas dari adanya kepentingan elit dibelakangnya (Akbar, 2018).

Koalisi dapat didefinisikan sebagai penggabungan kekuatan antaraktor politik yang sebelumnya bersaing, yang lahir dari kesadaran akan ancaman bersama atau kebutuhan untuk mencapai tujuan yang mustahil diraih secara mandiri, dalam konteks politik, koalisi sering kali melibatkan beberapa partai yang bersatu untuk memperkuat posisi mereka dan mencapai tujuan bersama yang lebih besar, seperti memenangkan pemilihan atau menguasai kekuasaan legislatif (Heywood dalam Putri, 2019). Keberadaan koalisi ini memungkinkan para pihak untuk menggabungkan kekuatan dan sumber daya, sehingga meningkatkan peluang mereka dalam mencapai tujuan politik yang diinginkan, dengan demikian, koalisi berfungsi sebagai strategi penting dalam dinamika politik, terutama dalam sistem politik yang terdiri dari banyak partai, tak satu pun di antara partai tersebut mampu meraih suara mayoritas secara independen tanpa bergantung pada aliansi.

Fokus utama parpol adalah meraih dan mempertahankan kekuasaan politik guna mengimplementasikan agenda kebijakan yang dirancang berdasarkan platform ideologi tertentu. Oleh karena itu, untuk mewujudkan agenda tersebut, parpol membangun jejaring kolaborasi

dengan sesamanya dalam kerangka sistem politik yang melibatkan multipartai (Agustino, 2020). Pembentukan koalisi dilakukan oleh para aktor politik melalui proses tawar-menawar, dengan tujuan menciptakan kontrak politik yang mengatur baik proses pembentukan koalisi maupun mekanisme pemutusan kerja sama (Maulida, 2021).

Koalisi parpol dapat dibedakan menjadi tiga jenis: (1). Koalisi pemilu merujuk pada kolaborasi strategis antar parpol yang sepakat untuk tidak saling bersaing dalam pemilu, dengan tujuan meningkatkan perolehan suara secara kolektif; (2). Koalisi legislatif merupakan bentuk kerja sama antara beberapa parpol berdasarkan kesepakatan bersama untuk mendorong pengesahan kebijakan atau agenda khusus di lembaga perwakilan; (3). Koalisi pemerintahan adalah kerja sama resmi antar parpol yang melibatkan pembagian posisi menteri dalam kabinet. Salah satu contohnya adalah *grand coalition*, yakni aliansi antara seluruh partai dominan dalam suatu negara untuk bersama-sama memimpin pemerintahan (Salvatore, 2014).

Pemilihan kepala daerah secara langsung, terdapat kecenderungan umum di mana partai-partai politik membentuk aliansi untuk mengusung calon bersama, pembentukan aliansi antar parpol memiliki beberapa keuntungan, antara lain:

1. Memudahkan pencapaian tujuan bersama
2. Menciptakan hubungan yang saling menguntungkan
3. Meningkatkan perolehan suara secara signifikan
4. Meningkatkan peluang kemenangan dalam pemilihan umum
5. Membentuk pemerintahan yang solid dan berkelanjutan

Partai-partai politik dapat menggabungkan kekuatan dan sumber daya mereka untuk mencapai hasil yang lebih optimal dalam kontestasi politik (Maulida, 2021). Dalam konteks pemerintahan parlementer, ketika tidak satupun partai meraih suara terbanyak, pembentukan kabinet

pemerintahan hanya mungkin terwujud melalui aliansi antarpantai yang memperoleh kursi di parlemen. Sementara itu, dalam sistem presidensial, meskipun koalisi partai juga dapat terbentuk, hal ini tidak menjadi masalah yang signifikan. Studi tentang koalisi memiliki peran krusial dalam menganalisis komitmen aktor politik dalam membangun entitas kolektif, sekaligus mengkaji faktor-faktor pendorong kebijakan mereka, strategi perumusan kerja sama, parameter evaluasi yang digunakan, serta distribusi sumber daya yang dimiliki (Maulida, 2021).

2.4 Kerangka Pikir

Peneliti membangun kerangka konseptual dalam penelitian berjudul “Koalisi Partai Politik pada Pemilihan Gubernur Provinsi Lampung 2024” dengan terlebih dahulu melakukan identifikasi awal terhadap objek kajian. Fokus analisis dalam kajian ini adalah Partai Gerindra dan PKB sebagai subjek utama yang terlibat dalam dinamika koalisi pemilihan ditinjau dari siapa aktor penggagas koalisi, serta menganalisis faktor-faktor motivasi pembentukan koalisi antara Gerindra dan PKB.

Setelah peneliti mendeskripsikan tentang aktor penggagas koalisi antara Gerindra dan PKB di Lampung menggunakan teori mesin politik yang mengatakan bahwa pembentukan koalisi tidak terlepas dari peran sentral aktor-aktor politik yang memiliki kapasitas dan otoritas dalam proses pengambilan keputusan strategis (Merton, 1968). Selanjutnya peneliti akan menganalisis faktor-faktor motivasi pembentukan koalisi antara Gerindra dan PKB dengan menggunakan *grand theory* yang dikembangkan oleh Muller dan Storm mengenai tantangan kontinu yang dialami partai politik dalam proses pengambilan keputusan. Teori ini menguraikan bahwa dalam situasi konflik antar-tujuan, parpol seringkali dipaksa melakukan kompromi strategis. Untuk mempertahankan basis elektorat, parpol mungkin perlu memilih prioritas pada aspek tertentu seperti pengembangan agenda kebijakan atau mendapatkan kekuasaan demi menjaga daya tarik elektoralnya. Selanjutnya pada *middle*

theory peneliti menggunakan dua variabel utama yang menjadi landasan teoretis yaitu motivasi kebijakan (*policy-seeking*) berdasarkan teori Anthony Downs dan motivasi kekuasaan (*office-seeking*) merujuk pada perspektif Kartz dan Mair. Kedua konsep ini dipilih untuk mengungkap faktor-faktor yang mendorong terbentuknya koalisi partai politik, mulai dari kesamaan kebijakan, ideologi hingga pertimbangan pragmatis dalam meraih kekuasaan.

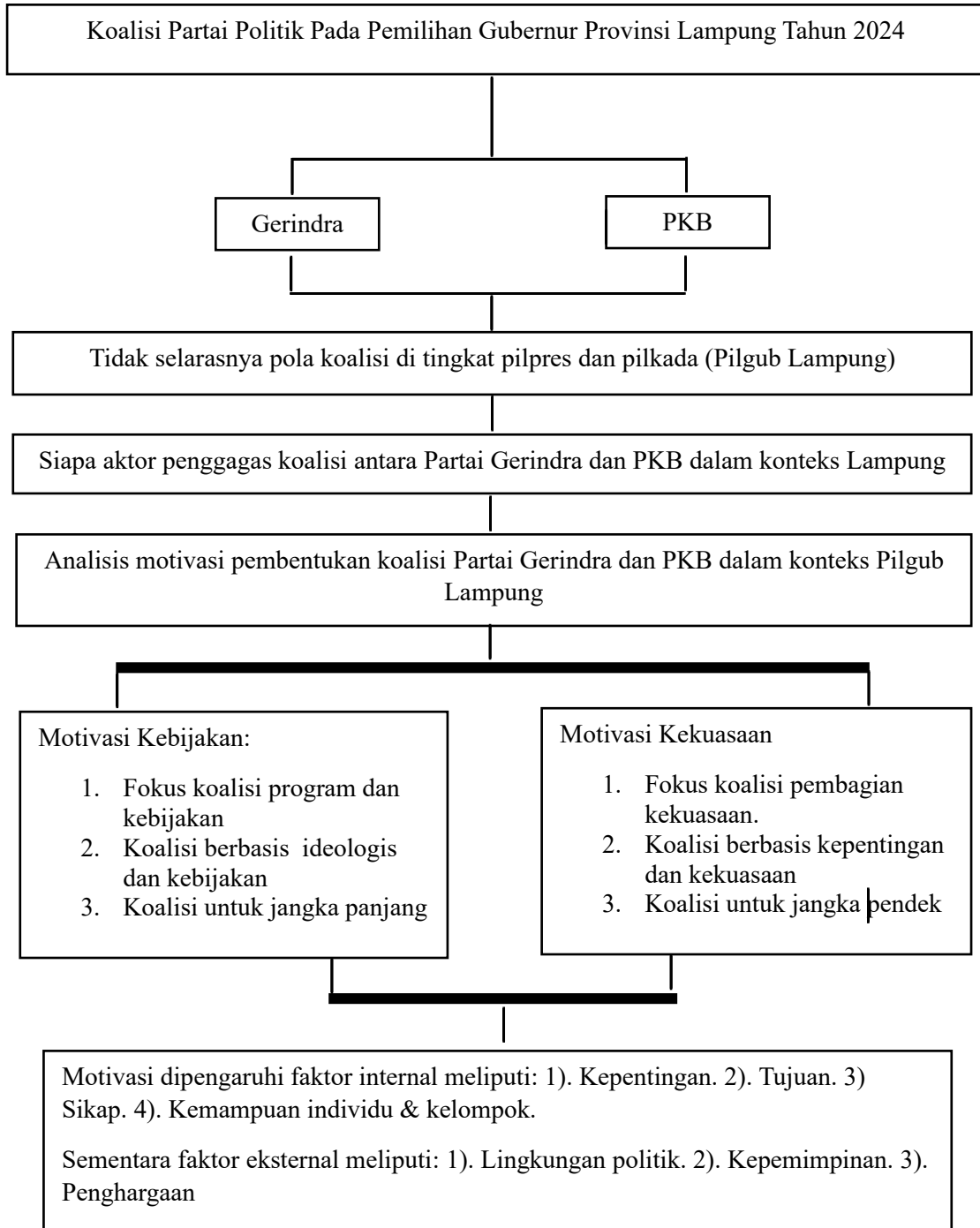
Motivasi kebijakan merujuk pada kecenderungan parpol membangun koalisi berdasarkan kesamaan agenda program atau ideologi untuk tujuan jangka panjang. Konsep ini dioperasionalkan melalui tiga indikator utama. Pertama, fokus pada program/kebijakan, yang tercermin dari kesamaan visi-misi pembangunan daerah dan adanya dokumen formal seperti visi misi yang mengikat kerja sama antarpol. Kedua, koalisi berbasis ideologi, ditandai dengan kesesuaian platform partai dengan isu lokal Lampung (misalnya agraria atau pendidikan) serta pernyataan publik elit partai yang menekankan kesamaan nilai. Ketiga, koalisi untuk jangka panjang, yang terlihat dari komitmen membangun aliansi strategis di luar pilgub 2024, seperti rencana kolaborasi pada pemilu legislatif berikutnya.

Di sisi lain, motivasi kekuasaan menggarisbawahi kepentingan partai politik dalam meraih posisi strategis (seperti jabatan atau kontrol institusional) melalui koalisi pragmatis. Indikator utama. Pertama fokus pada pembagian kekuasaan, seperti negosiasi jabatan calon wakil gubernur. Kedua, koalisi berbasis kepentingan, yang mencakup pertukaran sumber daya politik (dukungan finansial, jaringan, atau akses ke pemilih). Ketiga, koalisi untuk jangka pendek, ditandai dengan pernyataan koalisi yang hanya berlaku untuk pilgub 2024 dan tidak adanya rencana integrasi program pascapemilu.

Selain kedua konsep tersebut, peneliti juga menambahkan kerangka konseptual umum yang menggabungkan prinsip-prinsip dari berbagai teori ilmu politik, psikologi sosial, dan perilaku organisasi, yaitu dengan menambahkan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi motivasi terbentuk koalisi. Faktor

Internal meliputi: (1). Kepentingan, berakar pada teori pilihan rasional, teori ini melihat aktor politik (individu/kelompok) sebagai entitas rasional yang bertindak untuk memaksimalkan kepentingannya (Downs, 1957); (2). Tujuan, terkait dengan teori tujuan organisasi misalnya dalam studi partai politik oleh Sartori, di mana partai memiliki tujuan ideologis atau pragmatis (Syaputra, dkk, 2022); (3). Sikap, berasal dari psikologi sosial Fishbein & Ajzen tentang *Theory of Planned Behavior* (1975), yang memengaruhi keputusan politik; (4). Kemampuan merujuk pada teori sumber daya politik, di mana kapasitas organisasi dan sumber daya menentukan tindakan. (Dahl, 1977). Sementara faktor eksternal meliputi: (1). Lingkungan politik terkait dengan teori kelembagaan March dan Olsen (Prasetio, 2024) yang menekankan pengaruh institusi, aturan, dan konteks eksternal; (2). Kepemimpinan berhubungan dengan teori kepemimpinan Transformasional (Burns), di mana gaya pemimpin memengaruhi dinamika koalisi; (3). Penghargaan, berdasar pada teori pertukaran sosial Homans dan Blau (Syahri, 2017) di mana koalisi terbentuk melalui pertukaran imbalan misalnya: jabatan, kebijakan, dukungan.

Berikut adalah kerangka pikir penelitian:



Gambar 1. Kerangka Pikir

Sumber: Diolah Peneliti (2024)

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan akademik sistematis yang dilaksanakan melalui tahapan metodologis yang kompleks (Bungin, 2011). Studi ini mengkaji motivasi koalisi partai politik dalam Pemilu Gubernur Lampung 2024 dengan mengadopsi metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Menurut Krik dan Miller, istilah penelitian kualitatif berakar pada konsep observasi non-kuantitatif, yang dikontraskan secara diametral dengan pendekatan berbasis angka atau statistik (Krik dan Miller, 1986).

Penelitian kualitatif merupakan metode riset yang menggunakan lingkungan alamiah sebagai basis untuk memahami fenomena sosial secara mendalam, dengan menerapkan beragam teknik pengumpulan data (Moleong, 2014). Pendekatan ini didefinisikan sebagai suatu metode yang tidak mengandalkan analisis statistik atau perhitungan numerik, melainkan berfokus pada penggalian makna subjektif dari suatu kejadian. Tujuan utamanya adalah menggambarkan fenomena secara menyeluruh dan sesuai konteks melalui proses pengumpulan data, di mana peneliti berperan sebagai alat utama dalam menganalisis, dan menafsirkan informasi (Sugiarto, 2015).

Metode deskriptif kualitatif dipilih karena pendekatan ini menyediakan kerangka filosofis yang memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap dinamika politik, termasuk motif dan interaksi antarpantai, tanpa terbatas pada

pengukuran kuantitatif, yang sebagaimana dikemukakan oleh Arikunto (Fuad dan Nugroho, 2014).

1. Fenomenologis merujuk pada pendekatan filosofis di mana hakikat kebenaran dapat diungkap melalui observasi mendalam terhadap manifestasi atau gejala yang muncul dari subjek yang dikaji.
2. Interaksi simbolis, sebagai pendekatan utama dalam kajian sosial, memiliki pengaruh signifikan dalam penelitian kualitatif. Terdapat empat premis kunci dalam teori ini: (1) Manusia bertindak didorong oleh upaya memenuhi kepentingan pribadi; (2) Tindakan individu merupakan produk interaksi sosial dengan lingkungan sekitarnya; (3) Perilaku manusia terbentuk oleh fenomena eksternal yang terjadi sebelumnya atau simultan; dan (4) Budaya berperan sebagai kerangka acuan yang membentuk pola perilaku dan keputusan individu.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan mengapa penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai pilihan metodologis utama, karena dengan pertimbangan bahwa fokus kajiannya adalah mengungkap kompleksitas proses pembentukan koalisi politik, motif aktor, dan dinamika interaksi yang melatarbelakanginya. Pertanyaan penelitian seperti “Bagaimana proses pembentukan koalisi Partai Gerindra dan PKB dalam Pilgub Lampung 2024?” menuntut eksplorasi mendalam terhadap konteks sosial-politik lokal, persepsi subjektif elit partai, serta relasi kekuasaan yang tidak dapat diukur secara numerik. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif dipandang paling sesuai karena memungkinkan peneliti menggali makna, motivasi, dan nuansa tersembunyi di balik keputusan koalisi melalui teknik pengumpulan data yang fleksibel dan interpretatif.

Pertama, sifat masalah penelitian yang bertujuan memahami “bagaimana” dan “mengapa” koalisi terbentuk dengan ketidakselarasan antara tingkat nasional dan daerah, memerlukan analisis berbasis konteks. Misalnya, faktor seperti kepentingan lokal, negosiasi jabatan, atau pengaruh elit daerah hanya dapat diurai melalui wawancara mendalam dengan aktor kunci, dan analisis dokumen

artikel berita online. Data kualitatif seperti transkrip wawancara atau catatan lapangan menjadi krusial untuk merekonstruksi tahapan koalisi, mulai dari inisiasi gagasan hingga finalisasi kesepakatan. Selain itu, teori pendukung seperti fenomenologi dan interaksi simbolis memberikan kerangka analitis untuk menafsirkan tindakan aktor. Fenomenologi membantu mengungkap persepsi subjektif penggagas koalisi, sementara interaksi simbolis menjelaskan bagaimana kepentingan pribadi, tekanan lingkungan, dan budaya politik membentuk keputusan mereka.

Kedua, pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan menguji hipotesis atau menggeneralisasi temuan ke populasi luas, melainkan memahami realitas unik Pilgub Lampung 2024. Variabel seperti “motivasi kebijakan” atau “ambisi kekuasaan” bersifat abstrak dan multidimensi, sehingga tidak dapat direduksi menjadi angka atau statistik. Contohnya, pertimbangan ideologis Partai PKB dalam berkoalisi atau kalkulasi elektoral Gerindra untuk memenangkan pilkada hanya dapat dijelaskan melalui narasi yang kaya konteks. Data kuantitatif seperti survei elektoral mungkin mampu memetakan preferensi pemilih, tetapi gagal mengungkap proses lobi tertutup, konflik internal partai, atau pertukaran sumber daya politik yang terjadi di balik layar.

Ketiga, peran peneliti sebagai instrumen utama dalam penelitian kualitatif memungkinkan interpretasi data yang responsif terhadap dinamika lapangan. Peneliti tidak hanya mengumpulkan fakta, tetapi juga menganalisis nuansa bahasa, sikap politisi, atau kepentingan terselubung yang terungkap selama wawancara. Fleksibilitas ini sesuai dengan karakter studi politik yang seringkali melibatkan perubahan strategi koalisi seiring perkembangan situasi. Misalnya, jika selama penelitian terjadi pergeseran dukungan partai akibat intervensi pusat, peneliti dapat segera menyesuaikan pertanyaan wawancara atau sumber data untuk merespons temuan baru.

Di sisi lain, pendekatan kuantitatif dinilai kurang relevan karena tidak mampu menjawab pertanyaan penelitian yang bersifat eksploratif dan interpretatif. Metode seperti survei atau analisis statistik lebih cocok untuk mengukur tren elektoral, persentase dukungan, atau korelasi variabel, bukan untuk mengungkap alasan di balik ketidakselarasan koalisi nasional-daerah. Selain itu, data kuantitatif cenderung mengabaikan konteks lokal, seperti pengaruh tokoh kharismatik atau isu spesifik Lampung (misal: konflik agraria atau dinamika hubungan antar-elit), yang justru menjadi kunci analisis dalam penelitian ini.

Dengan demikian, pendekatan kualitatif dipilih bukan hanya karena kesesuaiannya dengan paradigma interpretatif, tetapi juga karena kemampuannya memberikan gambaran utuh dan mendalam tentang realitas politik yang kompleks. Melalui metode ini, peneliti dapat menyajikan narasi yang memadukan perspektif aktor, tekanan struktural, dan konteks Lampung 2024, sehingga hasil penelitian tidak hanya deskriptif, tetapi juga kaya akan analisis kritis tentang motif di balik koalisi Gerindra-PKB. Pada akhirnya, pilihan metodologis ini menjamin validitas kontekstual dan relevansi temuan dalam menjawab rumusan masalah yang diajukan.

3.2 Fokus Penelitian

Masalah dalam penelitian kualitatif berfokus pada suatu tema tertentu. Pada dasarnya, pemilihan masalah ditentukan oleh paradigma yang dianut oleh peneliti, masalah lebih dari sekadar sebuah pertanyaan dan berbeda dengan tujuan, masalah merupakan kondisi yang muncul dari interaksi antara dua faktor atau lebih, yang menciptakan situasi yang menimbulkan kebingungan dan secara otomatis membutuhkan jawaban (Guba dalam Putri, 2019).

Dalam kajian ini berfokus pada dinamika pembentukan koalisi Partai Gerindra dan PKB dalam pilgub Lampung 2024, ditinjau dari siapa aktor penggagas koalisi, untuk mengkaji siapa aktor penggagas koalisi peneliti menggunakan

teori mesin politik yang mengatakan bahwa pembentukan koalisi tidak terlepas dari peran sentral aktor-aktor politik yang memiliki kapasitas dan otoritas dalam proses pengambilan keputusan strategis (Merton, 1968). Selanjutnya peneliti juga akan menganalisis faktor-faktor motivasi pembentukan koalisi antara Gerindra dan PKB, untuk mengkaji faktor motivasi pembentukan koalisi, peneliti menggunakan dua variabel utama yang menjadi landasan teoretis yaitu motivasi kebijakan (*policy-seeking*) berdasarkan teori Anthony Downs dan motivasi kekuasaan (*office-seeking*) merujuk pada perspektif Kartz dan Mair. Kedua konsep ini dipilih untuk mengungkap faktor-faktor yang mendorong terbentuknya aliansi politik, mulai dari kesamaan kebijakan, ideologi hingga pertimbangan pragmatis dalam meraih kekuasaan.

Motivasi kebijakan merujuk pada kecenderungan parpol membangun koalisi berdasarkan kesamaan agenda program atau ideologi untuk tujuan jangka panjang. Konsep ini dioperasionalkan melalui tiga indikator utama. Pertama, fokus pada program/kebijakan, yang tercermin dari kesamaan visi-misi pembangunan daerah dan adanya dokumen formal seperti visi misi yang mengikat kerja sama antarpantai. Kedua, koalisi berbasis ideologi, ditandai dengan kesesuaian platform partai dengan isu lokal Lampung (misalnya agraria atau pendidikan) serta pernyataan publik elit partai yang menekankan kesamaan nilai. Ketiga, koalisi untuk jangka panjang, yang terlihat dari komitmen membangun aliansi strategis di luar pilgub 2024, seperti rencana kolaborasi pada pemilu legislatif berikutnya.

Di sisi lain, motivasi kekuasaan menggarisbawahi kepentingan partai politik dalam meraih posisi strategis (seperti jabatan atau kontrol institusional) melalui koalisi pragmatis. Indikator utama. Pertama fokus pada pembagian kekuasaan, seperti negosiasi jabatan calon wakil gubernur. Kedua, koalisi berbasis kepentingan, yang mencakup pertukaran sumber daya politik (dukungan finansial, jaringan, atau akses ke pemilih). Ketiga, koalisi untuk jangka pendek, ditandai dengan pernyataan koalisi yang hanya berlaku untuk pilgub 2024 dan tidak adanya rencana integrasi program pascapemilu.

Berikut pemetaan indikator dan sub-indikator untuk masing-masing variabel dalam bentuk tabel:

Tabel 1. Motivasi Kebijakan

Indikator	Sub-Indikator
Fokus Koalisi Program/Kebijakan	1. Kesamaan visi pembangunan daerah. 2. Adanya dokumen formal seperti visi misi yang mengikat kerja sama antarpantai
Koalisi Berbasis Ideologi	1. Kesesuaian platform partai dengan isu lokal (misal: agraria, pendidikan). 2. Pernyataan publik elit partai yang menekankan kesamaan nilai.
Koalisi Jangka Panjang	1. Komitmen untuk membentuk aliansi strategis di luar pilgub Lampung 2024. 2. Rencana kolaborasi pada pemilu berikutnya.

Tabel 2. Motivasi Kekuasaan

Indikator	Sub-Indikator
Fokus Pembagian Kekuasaan	1. Negosiasi jabatan (misal: calon wakil gubernur).
Koalisi Berbasis Kepentingan	1. Dukungan finansial atau logistik dari partai mitra. 2. Pertukaran sumber daya politik (misal: jaringan, akses ke pemilih).

Indikator	Sub-Indikator
Koalisi Jangka Pendek	1. Pernyataan koalisi hanya berlaku untuk pilgub 2024. 2. Tidak adanya rencana integrasi program pascapemilu.

Untuk menguji kedua variabel tersebut, peneliti juga menambahkan kerangka konseptual umum yang menggabungkan prinsip-prinsip dari berbagai teori ilmu politik, psikologi sosial, dan perilaku organisasi, yaitu dengan menambahkan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi motivasi terbentuk koalisi. Faktor Internal meliputi: (1). Kepentingan, berakar pada teori pilihan rasional, teori ini melihat aktor politik (individu/kelompok) sebagai entitas rasional yang bertindak untuk memaksimalkan kepentingannya (Downs, 1957); (2). Tujuan, terkait dengan teori tujuan organisasi misalnya dalam studi partai politik oleh Sartori, di mana partai memiliki tujuan ideologis atau pragmatis (Syaputra, dkk, 2022); (3). Sikap, berasal dari psikologi sosial Fishbein & Ajzen tentang *Theory of Planned Behavior* (1975), yang memengaruhi keputusan politik; (4). Kemampuan merujuk pada teori sumber daya politik, di mana kapasitas organisasi dan sumber daya menentukan tindakan. (Dahl, 1977). Sementara faktor eksternal meliputi: (1). Lingkungan politik terkait dengan teori kelembagaan March dan Olsen (Eko, 2024) yang menekankan pengaruh institusi, aturan, dan konteks eksternal; (2). Kepemimpinan berhubungan dengan teori kepemimpinan Transformasional (Burns), di mana gaya pemimpin memengaruhi dinamika koalisi; (3). Penghargaan, berdasar pada teori pertukaran sosial Homans dan Blau (Syahri, 2017) di mana koalisi terbentuk melalui pertukaran imbalan misalnya: jabatan, kebijakan, dukungan.

Penelitian menggunakan dua metode pengumpulan data. Pertama, wawancara mendalam dengan elit partai untuk menggali persepsi subjektif tentang prioritas kebijakan atau kekuasaan. Kedua, analisis dokumen seperti artikel berita online.

Kriteria analisis dirancang untuk menentukan dominasi motivasi dalam koalisi. Dominasi kebijakan dinyatakan terpenuhi jika setidaknya dua indikator motivasi kebijakan terpenuhi, seperti adanya kesamaan program jangka panjang dan kesamaan ideologi. Dominasi kekuasaan ditetapkan apabila dua indikator motivasi kekuasaan terpenuhi, misalnya pembagian jabatan dan koalisi bersifat sementara. Sementara itu, kategori campuran digunakan jika kedua variabel muncul secara seimbang, misalnya partai mengedepankan program tertentu sembari melakukan negosiasi jabatan.

Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan tidak hanya mendeskripsikan proses koalisi, tetapi juga menganalisis kompromi antara idealisme kebijakan dan pragmatisme kekuasaan. Hasilnya diharapkan mampu memberikan gambaran utuh tentang bagaimana Partai Gerindra dan PKB menavigasi kepentingan ideologis, tekanan elektoral, serta konteks sosial-politik Lampung dalam membangun aliansi di Pilgub 2024.

3.3 Lokasi Penelitian

John W. Creswell mendefinisikan lokasi penelitian merujuk pada tempat atau konteks di mana penelitian dilakukan. Letak lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu kantor DPD Partai Gerindra dan kantor DPW PKB.

3.4 Penentuan Informan

Dalam penelitian ini, wawancara mendalam dengan narasumber kunci diterapkan sebagai salah satu metode pengumpulan data. Narasumber berperan sebagai sumber data primer yang menyampaikan pandangan mendalam terkait isu atau fenomena yang menjadi fokus kajian (Ade, 2018). Dalam menentukan responden, peneliti menerapkan metode *purposive sampling*, yakni teknik pengambilan sampel non-acak yang memilih narasumber berdasarkan kriteria

husus. Studi ini secara spesifik memfokuskan pemilihan responden pada beberapa aktor-aktor strategis, yaitu: aktor-aktor inti partai politik (*political elites*), lembaga pemantau pemilu, penyelenggara pemilu, dan praktisi/pakar yang memiliki kompetensi di bidang analisis politik.

Tabel 3. Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jabatan dalam instansi
1	Imam Santosa	Ketua Tim Sukses Partai Gerindra
2	Jauharoh Haddad	Wakil Ketua DPW PKB Lampung
3	Sutono	Sekretaris PDIP (Partai Nonkoalisi)
4	Bendi Juantara	Akademisi pengampu mata kuliah parpol
5	Rohmani	Lembaga Pemantau Pemilu (Netfid)
6	Erwan Bustami	Ketua KPU Provinsi Lampung

Sumber: Diolah Peneliti (2024)

Berdasarkan tabel di atas, Berikut penjelasan rinci alasan pemilihan masing-masing informan:

Pertama, Imam Santosa sebagai Ketua Tim Sukses Partai Gerindra dipilih karena perannya yang sentral dalam merancang strategi koalisi, termasuk negosiasi jabatan, memungkinkan peneliti mengungkap motivasi internal partai, baik yang bersifat kebijakan maupun pragmatis, seperti pertimbangan dalam memilih mitra koalisi atau kompromi kebijakan.

Kedua, Jauharoh Haddad selaku Wakil Ketua DPW PKB Lampung mewakili perspektif mitra koalisi (PKB). Keberadaannya krusial untuk memahami

kesepakatan bilateral, seperti pembagian kekuasaan atau kesamaan visi program. Selain itu, informan ini dapat menjelaskan dinamika internal PKB, termasuk tekanan dari basis konstituen atau kepentingan lokal Lampung yang memengaruhi keputusan aliansi.

Ketiga, Sutono sebagai Sekretaris PDIP (partai nonkoalisi) memberikan sudut pandang eksternal tentang terbentuknya koalisi Gerindra-PKB terhadap kompetisi. Sebagai perwakilan partai di luar aliansi, informan ini mampu mengungkapkan strategi PDIP dalam merespons koalisi tersebut, serta menilai kelebihan atau kelemahan aliansi dari sudut pandang kompetitor.

Keempat, Bendi Juantara, akademisi pengampu mata kuliah partai politik, dipilih untuk memberikan analisis teoretis terkait pola koalisi di Indonesia. Perannya membantu mengaitkan temuan empiris dengan kerangka konseptual motivasi kebijakan dan kekuasaan, sekaligus membandingkan kasus Lampung dengan dinamika serupa di daerah lain. Pendekatan akademis ini memperkaya analisis kontekstual penelitian.

Kelima, Rohmani dari Lembaga Pemantau Pemilu (Netfid) memberikan perspektif independen dan objektif. Sebagai pemantau, informan ini dapat mengungkapkan kepatuhan koalisi terhadap regulasi pemilu, transparansi proses negosiasi, serta potensi pelanggaran etika politik. Data dari lembaga pemantau juga berfungsi sebagai penyeimbang narasi subjektif yang mungkin muncul dari elit partai.

Keenam, Erwan Bustami selaku Ketua KPU Provinsi Lampung dipilih karena otoritasnya dalam aspek legal-administratif koalisi. Informan ini mampu menjelaskan prosedur formal pendaftaran koalisi, verifikasi dokumen, dan mekanisme pembagian kursi. Selain itu, penjelasannya tentang tantangan regulasi atau konflik administratif selama proses koalisi menjadi data kunci untuk memahami hambatan struktural yang dihadapi partai.

Kombinasi informan ini dirancang untuk memastikan cakupan data yang holistik. Dari aktor langsung koalisi (Gerindra-PKB), peneliti menggali motivasi subjektif dan strategi internal. Dari PDIP sebagai kompetitor, diperoleh analisis persaingan elektoral. Akademisi dan lembaga pemantau memberikan pendekatan teoretis dan objektif, sementara KPU menjembatani aspek regulasi. Dengan demikian, penelitian tidak hanya mengandalkan narasi tunggal, tetapi menyajikan analisis multidimensi yang mencakup faktor ideologis, pragmatis, eksternal, dan struktural. Pemilihan ini menjamin validitas temuan dalam menjawab pertanyaan penelitian tentang bagaimana proses pembentukan koalisi Gerindra-PKB terbentuk dalam konteks Pilgub Lampung 2024.

3.5 Jenis dan Sumber Data

Secara konseptual, data merepresentasikan bahan mentah penelitian berupa kumpulan observasi atau fenomena yang belum melalui proses analisis. Dalam bentuk mentahnya, data seringkali belum memiliki makna kontekstual sehingga perlu diinterpretasi melalui tahapan verifikasi dan pengorganisasian untuk diubah menjadi pengetahuan yang koheren. Dalam konteks penelitian, sumber data diklasifikasikan dalam dua kategori utama berdasarkan asal perolehannya: data yang dikumpulkan langsung dari sumber pertama (primer) dan data yang diperoleh dari sumber kedua yang telah terdokumentasi (sekunder) (Sugiyono 2018):

1. Data Primer

Data primer merujuk pada jenis data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui interaksi dengan subjek atau lokus penelitian. Dalam studi ini, peneliti secara mandiri mengumpulkan data tersebut langsung dari sumber utama (*first-hand*) dengan metode wawancara semi-terstruktur. Proses pengambilan data dilakukan melalui dialog mendalam dengan narasumber kunci yang diseleksi berdasarkan kriteria kesesuaian dengan fokus penelitian. Instrumen wawancara dirancang menggunakan pedoman terstandarisasi untuk memastikan validitas dan konsistensi data. Dengan

demikian, basis data utama dalam kajian ini bersumber dari transkripsi hasil interaksi langsung antara peneliti dengan partisipan yang direkrut secara selektif.

2. Data Sekunder

Data sekunder didefinisikan sebagai sumber informasi tidak langsung yang diperoleh melalui medium perantara, seperti dokumentasi tertulis/elektronik atau pihak ketiga yang memiliki akses terhadap data tersebut. Berbeda dengan data primer, jenis data ini tidak dihasilkan secara mandiri oleh peneliti, melainkan bersumber dari data dokumentasi KPU Provinsi Lampung dan artikel berita online

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi (Suharsaputra, 2014) sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2016). Penelitian ini menggunakan teknik wawancara dalam pengumpulan data pada penelitian ini karena dengan melakukan wawancara dapat berinteraksi langsung dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data sekunder berupa data arsip yang telah diarsipkan oleh KPU Provinsi Lampung, artikel berita online, serta beberapa kajian-kajian literatur yang digunakan dalam mendukung penelitian ini. Alasan peneliti memilih metode pengumpulan data melalui dokumentasi karena dianggap sebagai sumber bukti yang akurat dalam penelitian. Dokumentasi juga berfungsi sebagai referensi bagi peneliti

untuk mengamati data-data yang mencerminkan fenomena yang telah tercatat selama periode waktu yang panjang.

3.7 Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperoleh dari lapangan terkumpul, tahap selanjutnya yang dilakukan adalah mengolah data tersebut. Teknik pengolahan data menurut (Efendi dkk., dalam Putri, 2019) terdiri dari:

1. *Editing*

Editing adalah kegiatan dalam penelitian ini dilakukan dengan meninjau kembali informasi yang telah diperoleh untuk memastikan validitasnya dan mempersiapkannya untuk tahap selanjutnya, dalam proses ini, peneliti mengolah data hasil wawancara dengan merujuk pada pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam pedoman wawancara, serta memilih dan memilih data yang relevan untuk penulisan.

2. Interpretasi Data

Pada tahap ini, data penelitian yang telah dijelaskan baik melalui narasi maupun tabel akan diinterpretasikan untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian. Peneliti juga melakukan interpretasi dalam penyajian data yang diperoleh dari cerita-cerita yang bersifat rahasia, dengan memilih kata-kata yang tepat agar tidak menimbulkan kesan negatif bagi pihak-pihak tertentu, hasil penelitian disajikan secara lengkap dalam lampiran, yang juga disusun agar relevan dengan temuan penelitian.

3.8 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar (Neuman, 2014). Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode interaktif yang terdiri dari beberapa langkah yaitu: reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan

prosedur reduksi data sebagai tahap pemilihan data-data penting, *display* data sebagai tahap penyajian data dan menarik kesimpulan (verifikasi), proses tersebut dijabarkan menurut (Milles dalam Putri, 2019) yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan dan fokus pada penyederhanaan, pengabstrakan, serta transformasi data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan, proses ini merupakan bentuk analisis yang bertujuan untuk memperjelas, mengelompokkan, mengarahkan, menghapus informasi yang tidak relevan, dan mengorganisir data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik dan diverifikasi.

2. *Display* (Penyajian Data)

Catatan penting yang diperoleh di lapangan disajikan dalam format teks deskriptif agar pembaca dapat memahami informasi dengan lebih mudah, langkah selanjutnya, peneliti menyajikan data yang diperoleh dalam bentuk tabel, dengan tujuan untuk mengintegrasikan informasi secara terstruktur dan komprehensif.

3. Verifikasi Data

Data diuji keabsahannya melalui validitas internal, yang mencakup aspek kebenaran, serta validitas eksternal yang berkaitan dengan penerapan, dan reliabilitas yang berfokus pada konsistensi dan objektivitas, setelah data diuji, kesimpulan dapat ditarik. Kesimpulan ini merupakan tahap di mana peneliti mencari arti dan makna, serta menjelaskan hasil secara singkat agar mudah dipahami sesuai dengan tujuan penelitian, dalam proses verifikasi data, peneliti berupaya menggunakan penulisan yang tepat dan terstruktur sesuai dengan data yang telah disajikan.

3.9 Teknik Validasi/Keabsahan Data

Teknik keabsahan data merujuk pada sejauh mana data yang dilaporkan oleh peneliti sesuai dengan realitas yang terjadi pada objek penelitian (Sugiyono, 2016). Dalam penelitian ini, teknik keabsahan data yang digunakan adalah dengan melakukan uji kredibilitas melalui triangulasi. Triangulasi dalam

konteks uji kredibilitas diartikan sebagai proses memverifikasi data dari berbagai sumber, menggunakan berbagai metode, dan pada waktu yang berbeda.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi yang dikembangkan oleh Denzin, yang terdiri dari empat jenis triangulasi sebagai metode pemeriksaan untuk mencapai keabsahan data, yaitu dengan memanfaatkan sumber, metode, peneliti, dan teori (Moleong, 2014). Jenis triangulasi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Triangulasi sumber, peneliti menggunakan berbagai sumber seperti undang-undang tentang pemilihan kepala daerah, dokumen, arsip dan berita online.
2. Triangulasi metode, dalam penelitian ini menggunakan metode seperti wawancara dan metode dokumentasi yang diperoleh dari beberapa informan yang berkaitan dengan koalisi partai politik.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan analisis terhadap dinamika koalisi Partai Gerindra dan PKB dalam Pemilihan Gubernur Lampung 2024, dapat disimpulkan:

1. Aktor Penggagas Koalisi

Koalisi antara Gerindra dan PKB di Lampung diinisiasi oleh aktor politik di tingkat nasional dan lokal. Di tingkat nasional, Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) memainkan peran sentral sebagai pengarah strategi koalisi melalui instruksi hierarkis. Di tingkat daerah, Rahmat Mirzani Djausal (RMD) dari Gerindra dan Jihan Nurlela dari PKB menjadi aktor kunci yang memfasilitasi lobi dan negosiasi. RMD, dengan elektabilitas tinggi sebagai ketua partai gerindra Lampung dan rekam jejak sebagai pemenang pemilu legislatif sebelumnya dan Jihan Nurlela juga yang merupakan pemenang pemilu dua kali pada pileg DPD.

2. Analisis berdasarkan teori Anthony Downs (motivasi kebijakan) dan Kartz & Mair (motivasi kekuasaan) dilanjutkan dengan menambahkan kerangka konseptual umum yang menggabungkan prinsip-prinsip dari berbagai teori ilmu politik, psikologi sosial, dan perilaku organisasi.

Dengan menambahkan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi motivasi terbentuk koalisi mengungkapkan bahwa koalisi ini lebih didominasi oleh motivasi kekuasaan. Hal ini terlihat dari:

1. Fokus pada Pembagian Kekuasaan: Gerindra mendominasi posisi cagub RMD, sementara PKB memperoleh posisi cawagub, dengan pembagian wilayah kampanye berbasis kekuatan massa.
2. Kepentingan Jangka Pendek: Koalisi dirancang untuk memenangkan Pilgub 2024 melalui kombinasi elektabilitas calon, strategi pragmatis (seperti program 100 hari pertama), dan mobilisasi basis NU.
3. Minimnya Kesamaan Ideologi: Koalisi tidak didasarkan pada kesamaan platform ideologis, melainkan pada kalkulasi suara dan kebutuhan temporer. Program yang diusung dinilai "tempelan" dan kurang menyentuh isu strategis jangka panjang.

Sementara itu, dari tiga indikator motivasi kebijakan hanya satu indikator saja yang terpenuhi yaitu indikator kesamaan program dan kebijakan, terutama melalui upaya formal seperti Forum Group Discussion (FGD) dan kesesuaian program dengan RPJMD Lampung. Namun, substansi koalisi lebih bersifat permukaan, dengan dominasi pragmatisme elektoral.

5.2 Saran

1. Partai politik perlu memperkuat fondasi kebijakan dalam pembentukan koalisi dengan mengembangkan platform bersama yang jelas dan terukur. Proses FGD yang telah diinisiasi oleh RMD dapat dijadikan model untuk memastikan bahwa koalisi tidak hanya berorientasi pada kemenangan elektoral, tetapi juga pada implementasi program pembangunan yang berkualitas.
2. Proses pembentukan koalisi perlu dilakukan dengan lebih transparan dan akuntabel kepada publik. Partai politik perlu mengkomunikasikan secara jelas alasan pembentukan koalisi, program yang akan dijalankan, dan mekanisme evaluasi kinerja koalisi kepada masyarakat.

3. Partai politik perlu melakukan penguatan kapasitas elite politik daerah agar dapat berperan lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan strategis, tidak hanya sebagai implementator kebijakan dari tingkat pusat, tetapi juga sebagai inisiator dan formulator kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
4. Untuk peneliti yang ingin melakukan penelitian lanjutan, perlu melakukan analisis komparatif terhadap pola koalisi di berbagai daerah untuk mengidentifikasi variasi dan kesamaan dalam motivasi pembentukan koalisi, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang lebih holistik tentang fenomena koalisi dalam demokrasi lokal Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade, H. S. M. 2018. *Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif*. Universitas Esa Unggul.
- Aditama. 2015. *Dinamika Koalisi Partai Politik di Tingkat Lokal: Studi Kasus Koalisi PDIP-PKB Dalam Pemilukada Kota Pekalongan*. Universitas Diponegoro.
- Agustino, L. 2020. *Pengantar Ilmu Politik*. Intrans Publhising. Malang.
- Akbar, Y. 2018. *Koalisi Partai Politik Dalam UU No 10 Tahun 2016*. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 1(1), 59.
- Al-Hamdi, R. 2013. *Partai politik Islam, teori dan praktik di Indonesia*. Graha Ilmu. Jakarta.
- Anggoro, A. P. 2024. *Mungkinkah Koalisi Pilpres 2024 Sebangun dengan Pilkada?*. Kompas.id. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/04/07/mungkinkah-koalisi-pilpres-2024-sebangun-dengan-pilkada>. Diakses pada 3 Maret 2025.
- Budiardjo, M. 2015. *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Bungin, B. 2011. *Metodologi penelitian kualitatif: Aktualisasi metodologis ke arah ragam varian kontemporer*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Burns, J. M. (1979). *Leadership*. Harper & Row. New York.
- Dahl, R. A. 1971. *Poliarchy: Participation and opposition*. Yale University Press. New Haven CT
- Dalton, R. J., & Wattenberg, M. P. 2000. *Parties without partisan: Political change in advanced industrial democracies*. Oxford University Press. New York.
- Darmastuti, A. 2020. *Partai politik, pemilihan umum dan peran perempuan dalam politik dan pembangunan*. Penerbit Quantum. Yogyakarta.

- Djuyandi, Y. 2011. *Koalisi partai politik untuk demokrasi: Membangun demokrasi kebanggaan dalam nuansa pluralisme*. *Jurnal Humaniora*, 2(2), 1042-1049.
- Downs, A. 1957. *An economic theory of democracy*. Harper & Row. New York.
- Ekawati, E. 2015. *Koalisi partai Islam di Indonesia pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014*. *Jurnal Penelitian Politik*, 12(2), 17-31.
- Ekawati, E. 2019. *Peta koalisi partai politik di Indonesia pada pemilihan presiden era reformasi*. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, 7(2), 160.
- Ekowati, E. Y. 2019. *Pragmatisme politik: Antara koalisi, pencalonan, dan calon tunggal dalam pilkada*. *Transformative*, 5(1), 16-37.
- Fishbein, M., & Ajzen, I. 1975. *Belief, attitude, intention, and behavior: An introduction to theory and research*. Addison. Wesley.
- Fuad, A., & Nugroho, K. S. 2014. *Panduan praktis penelitian kualitatif*. PT Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Gibran. 2022. *Strategi partai keadilan sejahtera (PKS) dalam meningkatkan elektabilitas partai di pemilu 2019*. (Skripsi). Universitas Hasanuddin Makassar.
- Hertanto. 2014. *Peta Kekuatan Politik Partai-Partai Islam: Persaingan dan Koalisi dalam Pemilu di Lampung*. *Jurnal Islam dan Demokrasi*, 1(3), 31-46.
- Hertanto, & Sulaiman, N. A. 2013. *Koalisi transaksional partai politik dalam pemilihan umum kepala daerah di Lampung*. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*. 12(2), 18-29.
- Holilah, & Khaq, M. Z. 2024. *Implikasi Koalisi Partai Pada Proses Pembentukan Kebijakan Di Daerah*. *JPW (Jurnal Politik Walisongo)*, 6(1), 28-47.
- Jakarsih, I. 2024. *Chemistry Mirza-Jihan dan Potensi Besar Menang Pilgub Lampung 2024*. Lampung77.com.
<https://lampung77.com/politik/chemistry-mirza-jihan-dan-potensi-besar-menang-pilgub-lampung-2024/>. Diakses pada 3 Maret 2025
- Loso, dkk. 2013. *Analisis kegagalan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam memperebutkan kursi di DPRD Kabupaten Batang*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol 1.
- Makhasin, L. 2016. *Orientasi ideologi dan pragmatisme politik model pembentukan koalisi dalam pilkada serentak di Jawa Tengah 2015*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 19(3), 234.

- Maulida, K. 2021. *Strategi partai koalisi dalam kemenangan Eva Dwiana dan Deddy Amrullah pada pemilihan walikota Bandar Lampung 2020*. Tesis. Universitas Lampung.
- Merton, R. K. 1968. *Social Theory and Social Structure*. The Free Press. New York.
- Miles, M. B., et al. 2014. *Qualitative data analysis*. Library of Congress Catalogue-in Publication Data. United State of America.
- Moleong, L. J. 2014. *Metode penelitian kualitatif (Ed. Rev.)*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Muller, W., & Strom, K. 1999. *Policy, office, or votes? How political parties in western Europe make hand decisions*. Cambridge University Press. New York.
- Mulya, F. P. 2024. *Muhaimin: PKB sudah berkoalisi dengan Gerindra*. Antaranews.com. https://www.antaranews.com/berita/4269603/muhaimin-pkb-sudah-berkoalisi-dengan-gerindra?utm_source=chatgpt.com. Diakses pada 3 Maret 2025
- Neuman, W. L. 2014. *Social research methods: Qualitative and quantitative approach (7th ed.)*. British Library Cataloguing-in Publication Data. United State of America.
- Prasetio, D. E. 2024. *Ringkasan "The Oxford Handbook of Political Institutions"*. Paper. Universitas Negeri Surabaya.
- Priyanda, Y. 2024. *Jihan Ungkap Alasan Terima Pinangan Rahmat Mirzani Jadi Cawagub Lampung 2024*. Kupastuntas.co. <https://www.kupastuntas.co/2024/08/17/jihan-ungkap-alasan-terima-pinangan-rahmat-mirzani-jadi-cawagub-lampung-2024>. Diakses pada 3 Maret 2025.
- Putri, I. 2019. *Analisis motif koalisi partai politik dalam menghadapi pemilihan gubernur Lampung tahun 2018 studi pada partai NasDem, PKS dan Hanura*. Skripsi. Universitas Lampung.
- Riduan, A. 2024. *Debat Pilgub Lampung: Janji Muluk atau Solusi Nyata?*. Lampung.viva.co.id <https://lampung.viva.co.id/politik/3812-debat-pilgub-lampung-janji-muluk-atau-solusi-nyata>. Diakses pada 3 Maret 2025.
- Salvatore, S. 2014. *Media dan Politik: Sikap Pers terhadap Pemerintahan Koalisi di Indonesia (Media and Politics: The Relationship between the Press and Coalition Government in Indonesia)*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.

- Syahri 2017. *Ringkasan "Teori Pertukaran Sosial Goerge C. Homans dan Peterm Blau"*. Paper. Universitas Negeri Malang.
- Syaputra., dkk. 2022. *Sistem kepartaian Giovanni Sartori. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(1), 433-436.
- Sugiarto, E. 2015. *Menyusun proposal penelitian kualitatif: Skripsi dan tesis*. CV Solusi Distribusi. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2018. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Suharsaputra, U. 2014. *Metode penelitian pendekatan kuantitatif, kualitatif dan tindakan*. Refika Aditama. Bandung.
- Sujatmiko, A. P. 2016. *Kartelisasi partai politik pada pemilihan kepala daerah Kota Bandar Lampung tahun 2015*. Skripsi. Universitas Lampung.
- Sulaiman., dkk. 2014. *Competing Models In Political Coalition Analysis: System or Transactional?*. *Jurnal Analisis Politik*. 2(1), 11-30.
- Susilawan, M. A. 2015. *Tinjauan yuridis terhadap pemilihan gubernur dan wakil gubernur dalam sistem pemerintahan di Indonesia*. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume*, 8(2), 342-363.
- Yaqin, M. A., & Wardani, S. B. E. 2021. *Motivasi pembentukan koalisi mayoritas pengusung pasangan calon Machfud Arifin dan Mujiaman dalam Pilkada Kota Surabaya tahun 2020*. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 7(2), 52-75.